

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Adanya otonomi daerah ini memberikan wewenang pengelolaan keuangan sepenuhnya pada pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan pada bidang akuntansi di sektor pemerintahan. PP Nomor 71 menjadi dasar pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual. Penggunaan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah diperkuat dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi

pemerintahan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

Secara umum dijelaskan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dijelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintah daerah atau yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pentingnya penerapan SAPD juga tercantum dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina (2016) di kota Pekanbaru menghasilkan bahwa dengan diterapkannya SAPD akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Pekanbaru dan penelitian yang dilakukan Pujanira (2017) di Provinsi DIY menghasilkan bahwa SAPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari dua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa SAPD sangat penting penerapannya di lingkungan SKPD. SKPD sendiri seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah penyebutannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan efektif. Sesuai dengan Permendagri No 77/2020 yang antara lain menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, yaitu dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana SAPD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAPD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam

organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. SAPD juga merupakan alat yang dapat mendukung prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan SAP. Menurut Suryanto (2019) SAPD berfungsi sebagai pedoman yang menguraikan peran masing-masing. Sebagai pedoman, penjelasan setiap tahapan dapat dijelaskan dengan bagan alur ataupun dengan mendeskripsikan masing-masing peran. Hal yang terpenting bahwa SAPD sebagai pedoman bisa dimengerti dan diaplikasikan oleh para bagian masing-masing. Pada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dijelaskan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua sub-sistem pokok, Sistem Akuntansi SKPKD dan Sistem Akuntansi SKPD.

Dalam penerapannya, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat berjalan dan diterapkan dengan baik tentu dengan adanya faktor pendukung. Salah satunya adalah kebijakan akuntansi yang berlaku di daerah tersebut. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi merupakan pilar utama dalam pengembangan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi. Penelitian Suryanto (2020) tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah menghasilkan bahwa terdapat kaitan antara kebijakan akuntansi dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, Pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah harus selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. SAP memberi peluang untuk memilih prinsip-prinsip akuntansi yang akan digunakan pada proses akuntansi dimasing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memilih lima pilihan yang disesuaikan dengan beberapa prinsip akuntansi yang tertera dalam SAP. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing yang dapat menjadi kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan secara wajar. Proses pengumpulan bukti-bukti

transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan secara tahap-demi tahap diatur melalui SAPD.

Faktor lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi, Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka penerapan SAPD. Dalam penelitian Cornelia (2018) yang dilakukan di OPD-OPD Kabupaten Minahasa Selatan diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan, informasi akuntansi dalam definisinya merupakan *output* yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi sehingga masih memiliki kaitan dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Untuk memanfaatkan teknologi informasi dan menerapkan SAPD tentunya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kompetensi sumber daya manusia adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan yang ditekuninya. Sumber daya manusia yang kompeten mempengaruhi seberapa bagus penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Semakin bagus kompetensi sumber daya manusia-nya semakin efektif pula penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Kota Palembang selaku ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan saat ini diketahui sebagai salah satu kota yang melakukan prosedur sistem akuntansi cukup baik yang berpedoman pada permendagri nomor 64 tahun 2013 yang mana menjadi salah satu landasan hukum guna menyusun laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari opini audit yang dilakukan BPK setiap tahunnya. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2020, setidaknya kota Palembang sudah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut dari 2010 hingga 2019. Perolehan WTP secara berturut-turut dapat berarti bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik menerapkan prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah yang berlaku. Hal tersebut tentu dipengaruhi beberapa faktor sehingga penerapan prosedur tersebut berjalan baik seperti kebijakan akuntansi

yang berlaku, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang menerapkan prosedur tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Harris (2016) di kabupaten Ngawi dan Pacitan diketahui bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAPD di daerah tersebut, sedangkan dua variabel independent lainnya, tingkat pendidikan dan lama masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAPD. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan 2015 yang dilakukan pada SKPD Pemerintah kabupaten Ngawi dan Pacitan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada penerapan SAPD yang dilaksanakan oleh 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, yaitu terdiri dari 23 OPD Dinas, 5 OPD Badan, 1 Inspektorat, dan 1 OPD Satuan sekaligus menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Determinan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada OPD Pemerintah Kota Palembang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan untuk merumuskan isu atau permasalahan yang berupa pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui kebenarannya. Berikut penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan akuntansi, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilaksanakan di SA-SKPD.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Akuntansi terhadap Penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara Bersama-sama Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAPD pada OPD Pemerintah Kota Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

##### **1.4.2.1 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti: dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kebijakan akuntansi terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah di kota Palembang serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi terkait.
2. Bagi Instansi: sebagai masukan bagi pemerintah daerah berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan akuntansi di Kota Palembang yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian terkait topik yang sejenis.

3. Bagi Lembaga: Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang Akuntansi Sektor Publik.

#### **1.4.2.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang akuntansi sektor publik terkait penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis mengenai isi penelitian secara ringkas dan jelas. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bab secara sistematis mempunyai hubungan satu sama lain. Sistematika penulisan penelitian ini secara singkat sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah dari penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia, serta terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan uraian hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, kriteria responden, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini, menguraikan hasil analisis data yang telah diolah menggunakan aplikasi *SPSS* versi 26, Selanjutnya dilakukan

pembahasan berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada BAB II sehingga penelitian yang dilakukan dapat membantu tercapainya tujuan penulisan pada skripsi ini.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dimana penulis akan memberikan suatu simpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai masukan atau pendapat bagi OPD-OPD Pemerintah Kota Palembang dan penelitian selanjutnya.